

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN  
PADA PAPAN REKLAME ANTARA PERUSAHAAN  
ADVERTISING DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGANYAR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**HAPPY TSANIA ANNISA IKSAN**

**C 100 150 217**

**PROGAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA  
PAPAN REKLAME ANTARA PERUSAHAAN ADVERTISING  
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**PUBLIKASI ILMIAH**

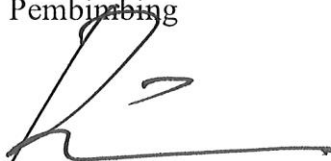
oleh:

**HAPPY TSANIA ANNISA IKSAN**

**C 100 150 217**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.**

**NIK. 244/NIDN. 0621095801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA  
PAPAN REKLAME ANTARA PERUSAHAAN ADVERTISING  
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**OLEH**

**HAPPY TSANIA ANNISA IKSAN**

**C100150217**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

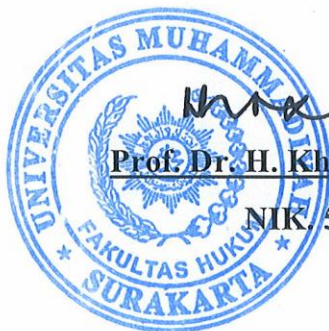
**Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019**

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H. (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Shallman, S.E., S.H., MM., M.Kn. (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)

**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum**

**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juli 2019

Penulis



**HAPPY TSANIA ANNISA IKSAN**

**C100150217**

# **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA PAPAN REKLAME ANTARA PERUSAHAAN ADVERTISING DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

## **Abstrak**

Salah satu manfaat pemasangan reklame bagi masyarakat adalah untuk membujuk atau mendorong calon konsumen sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Kontruksi hukum dari perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame dan problematika apa saja yang terjadi pada perjanjian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan yaitu bahwa perjanjian sewa menyewa antara Distrindo Jaya Ad-Works dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini berupa Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame. Karena perjanjian sewa menyewa berbentuk surat keputusan maka si penyewa membayar biaya sewa berupa pajak reklame kepada Pemerintah Daerah.

**Kata kunci:** reklame, perjanjian, sewa menyewa.

## **Abstract**

One of the benefits of installing billboards for the public is to persuade or encourage prospective customers to become interested in using the products or services offered. In this study, reviewing the legal construction of the advertisement agreement on billboards and the problems that occur in the agreement. The type of research used is descriptive with normative juridical research method. The data used are secondary data obtained from primary and secondary legal materials. Data collection is done through library research, observation and interviews as supporting data. The results of the research that the authors conclude are that the lease agreement between Distrindo Jaya Ad-Works and the Karanganyar Regency Government is in the form of a Decree of the Karanganyar Regency One-Stop Capital Security and Integrated Services Office concerning the Granting of License for Installation of Advertising. Because the lease agreement is in the form of a decree, the tenant pays the rental fee in the form of advertisement tax to the Regional Government.

**Keywords:** advertisement, agreement, rent.

## 1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin maju seperti sekarang ini, kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para produsen berlomba-lomba untuk membuat suatu produk yang memiliki nilai jual di pasaran. Agar produk yang dibuat oleh produsen dapat laku di pasaran dan dikenal oleh khalayak luas maka produk tersebut haruslah dipromosikan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya, salah satu media promosi yang paling efektif yaitu melalui iklan. Periklanan (*advertisement*) adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu, yaitu *advertiser* yang membayar jasa ke media massa atas penyiaran atau terbitnya iklan.

Perjanjian yang dilakukan antara perusahaan advertising dengan pihak pemakai jasa merupakan perjanjian sewa-menyewa. Sebab, kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1548 KUHPerdara :

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama sewaktu-waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Sedangkan perusahaan advertising sebagai pihak penyelenggara reklame wajib membayar pajak daerah kepada Pemerintah Daerah setempat atas penggunaan tanah tempat didirikannya papan reklame sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame yaitu “Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.”

Untuk dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen/pengguna jasa, diperlukanlah suatu perjanjian antara Distrindo Jaya Ad-Works dengan Pemerintah. Perjanjian tersebut berupa pemberian izin pemasangan reklame dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Distrindo Jaya Ad-Works yang bisa didapatkan dengan cara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati/Walikota dan melengkapi syarat-syarat serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Izin tersebut berisi tentang ketentuan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Peningkaran perjanjian oleh salah satu pihak akan mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum bagi pihak lain yang merasa dirugikan dengan peningkaran tersebut.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana Kontruksi Hukum dari Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Papan Reklame Antara Perusahaan Advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Kedua*, Problematika apa saja yang terjadi pada Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Papan Reklame Antara Perusahaan Advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## **2. METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep dan pendekatan kasus (*case approach*), serta memperoleh pengetahuan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain. Sumber dan jenis data dari penelitian ini yaitu Penulis melakukan penelitian pada Kantor Distrindo Jaya Ad-Works yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 23 Manahan Surakarta. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan data sekunder. Data primer berupa data Perjanjian sewa menyewa antara Perusahaan Advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diperoleh langsung dari Kantor Distrindo Jaya Ad-Works.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, Pengamatan (Observasi) dan Wawancara. Sedangkan Metode Analisis Data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kontruksi Hukum dari Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Papan Reklame Antara Perusahaan Advertising Dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar**

Dari data Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Papan Reklame Antara Perusahaan Advertising Dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut dapat penulis analisis bahwa kontruksi hukum dari perjanjian sewa menyewa antara Distrindo Jaya Ad-Works dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini berupa Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame. Walaupun perjanjian ini berupa surat keputusan, tetapi Surat keputusan ini dapat berlaku sebagai perjanjian juga karena Surat Keputusan sebagai sebuah surat yang dikeluarkan orang atau lembaga/badan yang yang berwenang untuk menerbitkan keputusan tersebut yang bersifat mengatur atau memutuskan sesuatu yang membawa suatu akibat tertentu bagi pemohon atau orang lain. Jika kita mencermati ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, sepanjang suatu surat atau “dokumen” baik itu berupa Surat Perjanjian maupun Surat Keputusan yang didalamnya memuat klausula yang mengandung suatu kewajiban (prestasi) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, maka apapun namanya, “dokumen” tersebut telah melahirkan sebuah perikatan. Selain itu, karena perjanjian sewa menyewa berbentuk surat keputusan maka si penyewa membayar biaya sewa berupa



pajak reklame kepada Pemerintah Daerah. Dengan ini isi perjanjian sewa menyewa yang berupa Surat Keputusan pemberian izin pemasangan reklame dapat dinyatakan telah sesuai dengan Pasal 1570 KUHPdata yang menyatakan bahwa jika sewa-menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa tersebut berakhir demi hukum atau secara otomatis apabila waktu yang telah ditentukan habis tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan pemberhentian sewa. Dan telah memenuhi syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Surat Keputusan ini memiliki konstruksi hukum yang sama pada perjanjian sewa menyewa pada umumnya yaitu didalamnya mengatur tentang subjek, objek, hak dan kewajiban, serta wanperestasi yang mengikat bagi para pihak.

### **3.2 Problematika yang terjadi pada Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Papan Reklame Antara Perusahaan Advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar**

Terdapat beberapa problematika yang masih sering didapati oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah ada beberapa reklame yang sudah mendapat izin pemasangannya tetapi tidak membayar pajak atau membayar pajak tetapi terlambat. Biasanya reklame seperti ini akan diberi teguran kemudian apabila tidak digubris oleh pemasangnya maka akan diberikan peringatan berupa penempelan stiker pada papan reklame yang belum membayar pajak tersebut bertuliskan “reklame ini belum bayar pajak”. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin pemasangan papan reklame tersebut akan dicabut. Hal ini juga berlaku pada papan reklame yang masa izin sewanya telah habis tetapi pihak pemasang dalam hal ini perusahaan Advertising tidak memperpanjang izinya atau memperpanjang izinnya tetapi terlambat. Apabila terjadi hal seperti itu yang tidak sesuai dengan perjanjian, cara penyelesaiannya telah diatur dalam perjanjian ini yaitu dengan mencabut izin reklame yang telah diberikan dan

membongkar reklame yang telah dipasang oleh pemegang izin atas biaya pemegang izin. Namun yang menjadi kelemahannya disini yaitu Tim Penataan Reklame yang bertugas menentukan titik reklame dan Tim Pengawas dan Pembongkaran Reklame yang bertugas mengawasi dan menertibkan reklame tidak selalu berada dilapangan dan tidak dapat selalu mengontrol lokasi terpasangnya reklame-reklame tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan mengenai konstruksi hukum dari perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan mengenai problematika apa saja yang terjadi pada perjanjian tersebut, yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan beserta saran yang diharapkan dapat bermanfaat kepada para pihak-pihak yang terkait maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian sewa menyewa antara Distrindo Jaya Ad-Works dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini berupa Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame. Walaupun perjanjian ini berupa surat keputusan, tetapi Surat keputusan ini dapat berlaku sebagai perjanjian juga karena Surat Keputusan sebagai sebuah surat yang dikeluarkan orang atau lembaga/badan yang berwenang untuk menerbitkan keputusan tersebut yang bersifat mengatur atau memutuskan sesuatu yang membawa suatu akibat tertentu bagi pemohon atau orang lain. Selain itu, karena perjanjian sewa menyewa berbentuk surat keputusan maka si penyewa membayar biaya sewa berupa pajak reklame kepada Pemerintah Daerah. Dengan ini isi perjanjian sewa menyewa yang berupa Surat Keputusan pemberian izin pemasangan reklame dapat

dinyatakan telah sesuai dengan Pasal 1570 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa jika sewa-menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa tersebut berakhir demi hukum atau secara otomatis apabila waktu yang telah ditentukan habis tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan pemberhentian sewa. Dan telah memenuhi syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPPerdata.

2. Bahwa terdapat beberapa problematika yang masih sering didapati oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah ada beberapa reklame yang sudah mendapat izin pemasangannya tetapi tidak membayar pajak atau membayar pajak tetapi terlambat. Biasanya reklame seperti ini akan diberi teguran kemudian apabila tidak digubris oleh pemasangnya maka akan diberikan peringatan berupa penempelan stiker pada papan reklame yang belum membayar pajak tersebut bertuliskan “reklame ini belum bayar pajak”. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin pemasangan papan reklame tersebut akan dicabut. Hal ini juga berlaku pada papan reklame yang masa izin sewanya telah habis tetapi pihak pemasang dalam hal ini perusahaan Advertising tidak memperpanjang izinya atau memperpanjang izinnya tetapi terlambat. Apabila terjadi hal seperti itu yang tidak sesuai dengan perjanjian, cara penyelesaiannya telah diatur dalam perjanjian ini yaitu dengan mencabut izin reklame yang telah diberikan dan membongkar reklame yang telah dipasang oleh pemegang izin atas biaya pemegang izin. Namun yang menjadi kelemahannya disini yaitu Tim Penataan Reklame yang bertugas menentukan titik reklame dan Tim Pengawas dan Pembongkaran Reklame yang bertugas mengawasi dan menertibkan reklame tidak selalu berada dilapangan dan tidak dapat selalu mengontrol lokasi terpasangnya reklame-reklame tersebut.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis uraikan, penulis dapat memberikan beberapa saran dalam permasalahan terkait kontruksi hukum dalam perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan

advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan mengenai Problematika yang terjadi dalam perjanjian tersebut, antara lain:

1. Mengenai problematika, Ketentuan pemasangan iklan/reklame media luar ruang seperti billboard pada dasarnya dituangkan dalam peraturan daerah setempat akan tetapi pada umumnya Pemerintah walaupun perusahaan advertising sudah membayar sewa tidak memperhatikan estetika maupun moral atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi budaya masyarakat seperti iklan rokok yaitu kurang berkenan untuk dipasang di muka umum dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut atau pemberian sanksi. Oleh karena solo kota layak anak dan hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah islamiyah karena sebagian besar masyarakat di kota solo beragama islam. Penulis memiliki saran agar Pemerintah mau memberikan izin reklame dengan memperhatikan atau menyaring lebih lanjut permohonan izin reklame yang akan dipasang di tempat umum, serta Pemerintah seharusnya menindak reklame yang dipasang tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan estetika dan moral bagi masyarakat.
2. Mengenai problematika yang terjadi pada perjanjian ini, walaupun kelihatannya wanprestasi tidak dicantumkan secara jelas melalui isi Pasal perjanjian sewa-menyewa namun terdapat Pasal yang menegaskan bahwa segala akibat hukum yang lahir dari perjanjian tersebut memiliki sanksi-sanksi yang diberikan kepada penerima izin dengan maksud bahwa apabila terjadi suatu masalah karena wanprestasi atau masalah lain yang dibuat atas kelalaian para pihak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum seperti izin reklame yang diberikan dicabut dan reklame yang telah dipasang dapat dibongkar atas biaya pemegang izin.

## **PERSANTUNAN**

Karya ilmiah ini penulis susun dengan sepuh hati dan penulis persembahkan kepada: kedua orang tua, keluarga besar, serta kekasih penulis yang telah

memberikan doa, dukungan moril dan materiil serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis dan memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LITERATUR**

Amiruddin, dan Zaenal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.